

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

AV. Dicey, 1952, *Introduction to the Study of The Law of The Constitution*,
Nineth Edition, Mac.Millan and Co, London.

Algra, N.E. dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Ali, Zainuddin, 2006, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Anoraga, Pandji, 1995, *Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing*,
Dunia Pustaka Jaya, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Azhary, Mohammad Tahir, 1992, *Negara Hukum, Suatu Study Tentang
Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya
pada Periode Medinah dan Masa Kini*, Bulan Bintang, Jakarta.

Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia UI-Press,
Jakarta.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, 2017, *Awas Investasi
Bodong Waspadalah*, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka
Komoditi, Jakarta.

Basah, Sjahran, 1997, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung.

Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.

Friedman, Lawrence M. 1967, *Legal Theory*, Columbia University Press,
New York.

G. Kartasasmita, 1997, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan
Yang Berakar Pada Masyarakat*, Bappenas, Jakarta.

Gautama, Sudargo, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni,
Bandung.

HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Grafindo, Jakarta.

- HS, Salim dan Budi Sutrisno, 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Hadjon, Philipus M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- _____, 1997, *Penelitian Hukum Dogmatik (Normatif)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hartono, Sunaryati, 1976, *Apakah The Rule of Law*, Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Huda Ni'matul, dan R. Nazriyah, 2010, *Problematika Pembatalan Peraturan Daerah*, Yogyakarta, FH UII Press.
- Indroharto, 1983, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Juanda, 2004, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung.
- Kairupan, David, 2013, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Kasmir dan Jakfar, 2010, *Studi Kelayakan Bisnis*, Kencana, Jakarta.
- Manan Bagir, dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandun.
- Manan, Bagir, *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian*, Bandar Lampung: FH UNILA, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Notohamidjojo, 1970, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta.

Oktoberina, Sri Rahayu, 2008, *Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta, Kompas.

Rasjidi, Lili, 2004, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

S.F, Marbun, 1977, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supancana, Ida Bagus Rachmdi, 2006, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Syahuri, Taufiqurahman, 2004, *Hukum Konstitusi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Titus, Harold H. et al, 1984, *Living Issues In Philosophy*, Alih Bahasa H.M Rasyid, *Persoalan Filsafat*, Bulan Bintang, Jakarta.

Wahjono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind. Hill Co., Jakarta.

Yamin, Mohammad, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Disertasi:

Amawinata, Rukmana, 1986, “Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul Dalam Pasal 26 UUD 1945”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Diantha, I Made Pasek, 2000, “Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman”, *Disertasi*, Universitas Airlangga, Surabaya.

Fachruddin, Irfan, 2003, “Konsekuensi Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah”, *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Lukman, Marcus, 1997, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional", *Disertasi*, Universitas Padjajaran, Bandung.

Priyambodo, Bambang, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Putusan Badan Peradilan Tata Usaha Negara", *Disertasi*, Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Jurnal:

Mariam dan Budi Hermono, "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Investor Investasi Tidak Wajar", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2016.

Monteiro, Josef M., "Polemik Peraturan Presiden dalam Sistem Hierarki Norma Hukum", *Jurnal Hukum Jurisprudensia*, Vol. 19 No. 2, 2020

Sasana, Hadi, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Investasi Swasta di Jawa Tengah", *Jurnal Jejak*, Vol. 1 No. 1, September 2008.

Makalah:

Hadjon, Philipus M. 1998, "Tentang Wewenang", *Makalah Pada Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Internet:

Dimas Andi, Sandy Baskoro, "Beragam Kedok Praktik Investasi Bodong (1)", <https://investasi.kontan.co.id/news/beragam-kedok-praktik-investasi-bodong-1>, diakses tanggal 7 Januari 2021.

Dimas Andi, Sandy Baskoro, "Tanpa Taji, Satgas Waspada Investasi Sebatas Memberi Aba-Aba (2)", <https://investasi.kontan.co.id/news/tanpa-taji-satgas-waspada-investasi-sebatas-memberi-aba-aba-2>, diakses tanggal 8 Januari 2021.

Dinda Audriene, "OJK Ingin Jokowi Terbitkan Perpres Satgas Waspada Investasi", <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160604182013-92-135850/ojk-ingin-jokowi-terbitkan-perpres-satgas-waspada-investasi>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

Eka Chandra Septarini, “Polisi Mengaku Banyak Kendala Berantas Investasi Ilegal di NTB”,

<https://kabar24.bisnis.com/read/20170919/78/691340/polisi-mengaku-banyak-kendala-berantas-investasi-ilegal-di-ntb>, diakses tanggal 9 Januari 2021.

Hukumonline.com, “Investasi Bodong Bukan Delik Aduan”,
<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt51e3c55456a2c/investasi-bodong-bukan-delik-aduan?page=all>, diakses pada tanggal 6 Januari 2021.

Hukumonline.com, “Satgas Waspada Investasi Butuh Payung Hukum Lebih Tinggi”,
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt575544ad7700c/satgas-waspada-investasi-butuh-payung-hukum-lebih-tinggi/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Ilman Hadi, “Mengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5116a70500028/mengenal-penyidik-pegawai-negeri-sipil-ppns/>, diakses tanggal 9 Januari 2020.

Legal Era Indonesia, “OJK Terima Pengaduan Korban Dream For Freedom”,
<https://legaleraindonesia.com/ojk-terima-pengaduan-korban-dream-for-freedom/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Kontan.co.id, “Awis Gunung Es Investasi Bodong”,
[http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/investasi bodong](http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/investasi%20bodong), diakses pada tanggal 5 Agustus 2020.

Yudho Winarto, “Kerugian Investasi Ilegal Capai Rp 100 Triliun”,
<https://investasi.kontan.co.id/news/kerugian-investasi-ilegal-capai-rp-100-t>, diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Pengadilan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 14).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).

Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53)

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 01/KDK.04/2013 Tentang Satuan
Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 2/KDK.02/2020 Tentang Satuan
Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Nota Kesepakatan 13 Lembaga/Kementerian Tentang Koordinasi Pencegahan
dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang
Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi tanggal 29
Desember 2017

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 259/PDI/2017/PT DKI,
perihal banding perkara Fili Muttaqien, 12 Oktober 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt,
perkara Fili Muttaqien, 17 Juli 2017.